

# Terminal Barang Internasional (TBI) dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Perbatasan Entikong, Indonesia-Malaysia

*Indonesian Journal of Religion and Society*,  
2019, Vol. 01 (02), 104-114  
© The Journal, 2019  
DOI: 10.36256/ijrs.v1i2.65

[www.journal.lasiqo.org/index.php/IJRS](http://www.journal.lasiqo.org/index.php/IJRS)

*Lasiqo* Journal

## Article History

Received: September, 18<sup>th</sup> 2019

Revised: November, 30<sup>th</sup> 2019

Accepted: December, 2<sup>nd</sup> 2019

## Nikodemus Niko

Jurusan Sosiologi, Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat, Indonesia  
nikodemusniko@outlook.com

## Samkamaria

Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia  
samkamaria.pk25@gmail.com

## ABSTRACT

*Entikong has the potential for economic growth, strategic location, and formal access support that is already capable and advanced. This article explores the impact of the construction of an international terminal goods (Terminal Barang Internasional) at the border of Entikong on the economic development potential of border communities. The method used is a descriptive exploratory where the data sources derived from primary data (interviews and opinion actors), while secondary data from the review desk results related to the economic development of the community in the country's border area. With the accessible of Entikong's border to Malaysia makes economic growth in the region is a good implication towards improving the welfare of local communities. Especially with the construction of international Terminal (TBI) at the border of Entikong, it is hoped that Entikong is able to grow rapidly and make this frontier region as a growth motor for the government of Sanggau Regency in particular and West Kalimantan in general.*

**Keywords:** *International Terminal Goods (TBI), economic development, Entikong, border area.*

## ABSTRAK

Entikong memiliki potensi perekonomian, lokasi strategis, dan dukungan akses formal yang sudah mumpuni dan maju. Tulisan ini mengeksplorasi tentang dampak dari pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) di perbatasan Entikong terhadap potensi pembangunan ekonomi masyarakat perbatasan. Metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif yang mana sumber data berasal dari data primer (wawancara dan pendapat aktor), dan data sekunder dari hasil desk review terkait pembangunan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan negara. Dengan terbukanya akses perbatasan Entikong terhadap Malaysia menjadikan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut memiliki implikasi yang baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Terlebih dengan pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) di perbatasan Entikong, diharapkan Entikong mampu berkembang pesat dan menjadikan wilayah perbatasan ini sebagai motor pertumbuhan bagi pemerintah Kabupaten Sanggau khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya.

**Kata Kunci:** Terminal Barang Internasional (TBI); pembangunan ekonomi; Entikong; wilayah perbatasan.

## 1. Pendahuluan

Entikong merupakan satu diantara lima kecamatan di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Entikong memiliki lima desa yaitu Entikong, Nekan, Semanget, Pala Pasang, dan Suruh Tembawang. Secara geografis Kecamatan Entikong masuk pada daerah administratif kabupaten Sanggau dan berbatasan dengan kabupaten Landak. Wilayah perbatasan ini masih memiliki daerah yang paling sulit untuk dijangkau ke beberapa desa di perbatasan, termasuk di antaranya desa Suruh Tembawang, kecamatan Entikong. Desa Suruh Tembawang memiliki sepuluh dusun yang terdiri dari dusun Kebak Raya, Suruh Tembawang, Pool, Senutul, Badat Baru, Badat Lama, Sekajang, Gun Jemak, Gun Tembawang dan Gita Jaya. Pada dasarnya wilayah pedesaan di perbatasan negara ini masih terbelakang dalam perkembangan ekonomi.

Pengembangan perekonomian kawasan perbatasan perlu dilakukan secara seimbang dengan pengelolaan aspek keamanan yang juga sering muncul sebagai isu krusial di kawasan ini. Untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai kawasan beranda depan yang berinteraksi positif dengan negara tetangga, diperlukan upaya dan komitmen dari seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, legislatif, dunia usaha, masyarakat adat dan seluruh stakeholder terkait. Perkembangan wilayah perbatasan acapkali ditandai dengan peran perdagangan dan investasi sebagai sebuah kemungkinan dalam pengembangan kawasan perbatasan yang menuju pada dunia tanpa batas (Ohmae, 1995).

Upaya pembangunan perbatasan tidak bisa hanya berfokus pada pengembangan fisik semata, upaya membangun perbatasan dengan pembangunan infrastruktur perlu segera diikuti dengan adanya regulasi dan sarana pendukungnya (Wangke, 2017). Wilayah perbatasan Entikong pada era pemerintahan Jokowi, mengubah paradigma pembangunan dari yang tadinya wilayah perbatasan dilihat sebagai halaman belakang negara, menjadi wilayah perbatasan sebagai beranda negara atau garda terdepan negara. Kemudian, pemerintah membangun kawasan *Border Development Centre* (BDC), dalam rangka mengakselerasi pembangunan di perbatasan Entikong.

Pengembangan kawasan BDC ini dimaksudkan sebagai pusat kegiatan industri, jasa dan perdagangan, dan juga pusat pelatihan dan pelayanan tenaga kerja yang terpadu dan mandiri yang dikelola oleh suatu kelembagaan yang profesional dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai (Laporan Pemerintah Kecamatan Entikong, 2010). Kemudian, dengan dibangunnya fasilitas infrastruktur gerbang Pos Lintas Batas Negara (PLBN) resmi di Entikong, kemudian diikuti dengan pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong merupakan wujud nyata perubahan perbatasan Entikong yang diharapkan juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat. Lintas Batas (PPLB) yang bersifat internasional atau dari status keimigrasiannya yang internasional ini dikenal sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan yang tradisional disebut dengan Pos Lintas Batas (Sumarsono, 2012).

Pembangunan kawasan perbatasan merupakan salah satu komitmen dan kebijakan pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2004-2025. Salah satu arah kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia dilakukan melalui pengembangan kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar yang selama ini luput dari perhatian pemerintah. Namun demikian, Keadaan ekonomi masyarakat di Entikong, khususnya di wilayah pedalaman seperti di desa Suruh Tembawang adalah ekonomi kelas menengah ke bawah. Hal ini antara lain dikarenakan keadaan geografis desa Suruh Tembawang berada jauh dari kota kecamatan Entikong dengan akses yang sulit serta kawasan perbukitan. Hal ini memicu sulitnya masyarakat menjangkau kota kecamatan Entikong untuk proses jual beli barang. Keadaan ini yang menurut Niko (2016) menyebutkan bahwa kemiskinan sebagai faktor penyebab terjadinya perdagangan orang (perempuan dan anak) di wilayah batas, yang mana ini menunjukkan bahwa *human security* masyarakat miskin di perbatasan sangat lemah. Kemiskinan perempuan menurut Niko (2019) merupakan bentuk eksistensi budaya patriarki pada masyarakat pedesaan adat.

Pengembangan kawasan perbatasan merupakan upaya untuk mewujudkan hak kedaulatan NKRI sebagai sebuah negara yang merdeka. Oleh karena itu, ruang lingkup pengembangan kawasan perbatasan terkait erat dengan persoalan penyelesaian batas wilayah negara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang amat strategis bagi Indonesia dari segi geo-politik dan geo-strategis. Penyelesaian persoalan perbatasan secara

damai dan upaya pengembangan kawasan perbatasan berikut penanganan masalahnya akan memperkuat efektivitas pelaksanaan politik luar negeri dan diplomasi untuk mencapai tujuannya sebagaimana yang ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945.

Pengembangan kawasan perbatasan juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan, yang karena lokasinya yang terpencil dan jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, saat ini masih dalam kondisi keterbelakangan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal ini juga sangat penting ditinjau dari aspek ketahanan bangsa. Konsep *responsibility to protect* yang dilakukan oleh pemerintahan yang kemudian mengadopsi konsep kedaulatan secara penuh, memiliki batasan-batasan dalam kaitannya dengan konsep kemanusiaan dan kapasitas bertindak secara efektif untuk melindungi warganya dari ancaman terhadap keamanan mereka baik dari luar maupun dari dalam negeri (Chandler, 2009:32-33).

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di perbatasan Entikong jelas belum dapat mengakomodir ekspor impor dikarenakan ketiadaan sarana maupun prasarana sehingga bagi pelaku perdagangan yang ingin melakukan ekspor impor masih bergantung pada pelabuhan di ibukota negara, Jakarta. Oleh karena itulah, pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) ini urgen untuk dibangun, agar ekspor impor tidak lagi harus ke Jakarta atau ke Pontianak. Jadi, kegiatan ekspor impor sudah bisa langsung dari TBI Entikong. TBI Entikong ini sepenuhnya untuk transaksi ekspor impor dan mempermudah pertukaran barang dari Indonesia ke Malaysia dan sebaliknya.

## **2. Kerangka Teori**

### **2.1. Border Diplomacy di Perbatasan Entikong**

Diplomasi merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh sebuah negara untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan (Wangke, 2017). Diplomasi berkaitan dengan manajemen hubungan antar aktor negara maupun non-negara. Diplomasi perbatasan merupakan pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka untuk menetapkan batas pada 3 matra (darat, laut dan udara) dan pengelolaan wilayah perbatasan serta kerja sama internasional untuk mempertahankan NKRI atas dasar prinsip-prinsip politik luar negeri RI dan hukum internasional yang berlaku (Iva dan Fauzan, 2012).

Perbatasan menjadi salah satu indikator dalam melihat kuat atau lemahnya suatu negara, oleh sebab itu pengelolaan perbatasan perlu ditingkatkan terutama dalam hal keamanan. Hal demikian dikarenakan daerah perbatasan merupakan entitas politik ruang dan juga menjadi garis penghubung kedaulatan sebuah negara terkait dengan pembangunan sosial dan juga pembangunan ekonomi perbatasan. Sebagai penghubung kedaulatan negara daerah perbatasan menjadi tempat yang rentan terhadap kejahatan-kejahatan lintas batas negara seperti penyelundupan ilegal logging, penyelundupan gula dan juga penyelundupan manusia (*human trafficking*).

Daerah perbatasan seperti menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan penyelundupan lintas batas, hal ini disebabkan karena letaknya yang sangat mudah dijangkau dan strategis. Seringkali kita menjumpai kasus pelanggaran perdagangan ilegal, seperti obat-obatan terlarang (NAPZA), perdagangan senjata ilegal dan perdagangan manusia. Pelanggaran perdagangan lintas batas ini sudah semestinya memerlukan perhatian yang khusus guna menjaga kedaulatan perbatasan (Laki, 2006).

Perbatasan Entikong memiliki aparat-aparat keamanan yang lengkap seperti kepolisian, pos keamanan imigrasi, dan bea cukai. Akan tetapi pelanggaran perdagangan lintas batas penyelundupan tidak hanya melebar di bidang ekonomi namun keamanan manusia juga akan terancam (Kristi, Damayanti, Haqqi, 2018). Artinya bahwa ancaman serius kemudian menyangkut pada keamanan manusia (masyarakat) di wilayah batas negara. Hal ini membutuhkan penyelesaian diplomatik yang komprehensif

### **2.2. Human Security di Perbatasan Entikong**

Berbicara mengenai isu keamanan yang berkaitan dengan keamanan manusia (*human security*) UNDP menyebutkan bahwa keamanan manusia (*human security*) berarti bahwa dapat lepas dari penderitaan kronik yang bisa disebabkan oleh adanya kelaparan, penyakit, dan penindasan. Kemudian, poin penting terkait keamanan manusia adalah tidak adanya kepastian hukum yang diberikan oleh negara terhadap masyarakat menunjukkan bahwa negara tersebut sedang berada dalam kondisi yang tidak aman.

Niko (2017) menyebutkan bahwa terjadi kasus-kasus perdagangan manusia, terutama korbannya adalah perempuan di perbatasan negara. Terjadinya perdagangan orang di wilayah-wilayah perbatasan negara, seperti yang terjadi di perbatasan Entikong merupakan kejahatan terorganisir dan lemahnya keamanan manusia di batas-batas negara (Elyta, 2012; Astuti, 2018). Masyarakat Indonesia secara konstitusional dilindungi dan dijamin hak-haknya. Oleh sebab itu dalam menyikapi persoalan keamanan sudah semestinya wilayah perbatasan perlu diperkuat pijakannya. Pijakan yang dimaksudkan adalah pijakan hukum, pijakan pembangunan sosial dan ekonomi, serta pijakan pembangunan institusi. Penguatan ini dalam rangka mewujudkan perbatasan sebagai halaman depan negara, garda dan wajah Indonesia. Oleh sebab itu, sudah semestinya pembangunan kawasan perbatasan harus ditingkatkan dengan cara memperkuat kapasitas aparat melibatkan pihak swasta dan pentingnya untuk melibatkan masyarakat lokal.

Di dalam buku putih pertahanan RI disebutkan bahwa salah satu ancaman nyata Indonesia adalah pelanggaran wilayah perbatasan (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Beberapa bentuk pelanggaran di daerah perbatasan diantaranya adalah *trafficking (human, weapons, drugs)*, *illegal logging*, dan *illegal fishing*. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 57 tahun 2014 tentang pedoman strategis pertahanan militer mengkategorikan perdagangan manusia sebagai salah satu ancaman yang berdimensi ekonomi (Elfitriani, Legionosuko & Waluyo, 2018).

### 2.3. Sosial-Ekonomi Masyarakat Perbatasan

Santrock (2007) menyebutkan bahwa status sosial ekonomi sebagai pengelompokan orang-orang berdasarkan kesamaan karakteristik pekerjaan, pendidikan dan ekonomi. Status sosial ekonomi menunjukkan ketidaksetaraan tertentu. Secara umum Santrock menyatakan anggota masyarakat memiliki beberapa karakter sebagai berikut.

- (1) Pekerjaan yang bervariasi, prestise, dan beberapa individu memiliki akses yang lebih besar terhadap pekerjaan berstatus lebih tinggi dibanding orang lain;
- (2) Tingkat pendidikan yang berbeda, ada beberapa individu memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan serta yang lebih baik dibanding orang lain;
- (3) Sumber daya ekonomi yang berbeda;
- (4) Tingkat kekuasaan untuk mempengaruhi institusi masyarakat. Perbedaan dalam kemampuan mengontrol sumber daya dan berpartisipasi dalam ganjaran masyarakat menghasilkan kesempatan yang tidak setara.

Menurut Soekanto (2014) sosial ekonomi adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam hubungannya dengan sumber daya. Sejalan dengan pernyataan tersebut, Abdulsyani (1994) mengatakan bahwa sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi. Dari pendapat tersebut, status sosial bermaksud untuk mengetahui keberadaan posisi seseorang di dalam sosial masyarakat.

Kemudian, George Soul menyatakan sektor sosial ekonomi adalah pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat khususnya dengan usaha memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan (Lipsey dan Steiner, 1991). Artinya, sosial ekonomi adalah tingkah laku manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan lainnya. Terdapat suatu pranata yang kemudian menjadi penopang adanya aktivitas sosial-ekonomi. Koentjaraningrat (1974) menyebutkan bahwa pranata ekonomi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk pencarian hidup, memproduksi, menimbun dan mendistribusikan harta dan benda yaitu *economic institution*. Kebutuhan akan pranata yang mengatur mengenai distribusi atau pertukaran barang dan jasa mulai dirasakan. Proses pertukaran itu mulai ditata dengan kaidah-kaidah atau norma-norma tertentu yang disepakati bersama.

Pengertian sosial ekonomi jarang dibahas secara bersamaan. Pengertian sosial dan pengertian ekonomi sering dibahas secara terpisah. Pengertian sosial dalam ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu masyarakat. Sedangkan pada departemen sosial menunjukkan pada kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkup pekerjaan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan orang

lain di sekitarnya. Sehingga kata sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. Sementara istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu “*oikos*” yang berarti keluarga atau rumah tangga dan “*nomos*” yaitu peraturan, aturan, hukum. Oleh sebab itu, secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosial ekonomi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan penghasilan. Hal ini disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam melihat secara terstruktur sosial ekonomi masyarakat untuk melihat kedudukan sosial ekonomi Melly G. Tan menyebutkan adalah pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan (Koentjaraningrat, 1981). Berdasarkan ini masyarakat tersebut dapat digolongkan ke dalam kedudukan sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi. Beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian status sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah kondisi suatu keluarga atau orang tua yang diukur dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, pemilikan kekayaan atau fasilitas serta jenis pekerjaan.

Secara garis besar kemunculan pranata sosial menurut Narwoko dan Suyanto (2004) diklasifikasikan ke dalam dua cara, yakni secara tidak terencana dan secara terencana. Secara tidak terencana artinya bahwa lembaga tersebut lahir secara bertahap (berangsur-angsur) dalam praktik kehidupan masyarakat. Hal ini biasanya terjadi ketika manusia dihadapkan pada masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya, dimana masyarakat akan dituntut dan dipaksa untuk beradaptasi. Lebih lanjut, Narwoko dan Suyanto (2004) menerangkan bahwa sebagai sebuah pranata, pranata ekonomi tidak dapat lepas dari kegiatan pokok dalam kegiatan ekonomi, yaitu *Gathering* (pengumpulan), *Production* (produksi), *Distributing* (distribusi), dan *Servicing* (jasa).

1. *Gathering* adalah proses pengumpulan barang atau sumber daya alam dari lingkungannya. Apa dan berapa banyak yang dikumpulkan merupakan pencerminan dari tingkat teknologi, tingkat modal, sifat tenaga kerja, dan kemampuan masyarakat mengorganisasi elemen-elemen tersebut.
2. *Production* adalah proses mengubah sumber daya alam (SDA) menjadi barang-barang atau komoditi tertentu sehingga dapat digunakan oleh sub sistem lainnya.
3. *Distributing* adalah proses pembagian barang dan komoditi pada subsistem-subsistem lainnya.
4. *Servicing* adalah organisasi dari elemen-elemen ekonomi yang tidak tercakup dalam proses produksi, tetapi diperlukan untuk menunjang proses ekonomi lainnya.

Penjelasan pranata ekonomi ini lebih menekankan pada kaidah yang mengatur masalah produksi, distribusi pemakaian barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia itulah dalam terminologi sosial disebut pranata ekonomi. Lebih lanjutnya dengan kata lain, pranata ekonomi adalah sarana yang distandarisasi untuk memelihara ketertiban dalam proses distribusi dan distribusi barang serta jasa. Menurut Jonathan M. Turner pranata ekonomi ini adalah sekelompok status sosial, norma umum dan peran relatif stabil dan saling berhubungan disekitar pengumpulan sumber-sumber daya produksi dan distribusi barang serta jasa. Proses produksi dan distribusi barang-barang dan jasa yang makin penting dan berbelit-belit adalah faktor utama yang melatarbelakangi munculnya pranata ekonomi (Narwoko dan Suyanto, 2004).

### 3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah deskriptif eksploratif yang mana sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Ciri dari jenis penelitian kualitatif dapat dilihat dengan jenis pendekatan ini menekankan pada penggalan, penjelasan, dan pendeskripsian pengetahuan secara etik, emik, dan holistik. Creswell (2010) menyebutkan data penelitian kualitatif dapat berupa lisan dan tulisan. Data primer didapatkan melalui wawancara dan pendapat aktor. Data sekunder dalam penelitian ini didapatkan melalui penelusuran tulisan-tulisan ilmiah seperti jurnal dan buku yang terkait dengan tema penelitian

### 4. Masyarakat Perbatasan: Eksistensi dan Kekayaan Budaya

Kecamatan Entikong merupakan kecamatan yang berbatasan darat dengan Malaysia, memiliki lima desa yaitu Desa Entikong, Desa Nekan, Desa Semanget, Desa Pala Pasang,

dan Desa Suruh Tembawang. Secara geografis Kecamatan Entikong masuk pada daerah administratif Kabupaten Sanggau dan berbatasan dengan Kabupaten Landak. Namun, wilayah perbatasan ini masih memiliki daerah yang paling sulit untuk dijangkau ke beberapa desa di perbatasan, seperti Desa Suruh Tembawang. Desa Suruh Tembawang memiliki sembilan Dusun yang terdiri dari Dusun Kebak Raya, Dusun Suruh Tembawang, Dusun Pool, Dusun Senutul, Dusun Badat Baru, Dusun Badat Lama, Dusun Sekajang, Dusun Gun Jemak dan Dusun Gun Tembawang. Desa Suruh Tembawang terdapat patok batas negara dengan Malaysia, namun dari sisi keterisolasian termasuk wilayah tertinggal dan pedalaman. Desa yang letaknya di ujung negeri ini berada pada garis terdepan dan masih sulit tersentuh pembangunan secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan akses menuju daerah tersebut melewati perbukitan yang didominasi oleh hutan tembawang yang notabene-nya dilindungi.

Masyarakat Entikong secara keseluruhan memiliki suku dan agama yang beragam. Namun, keunikan tersendiri di Desa Suruh Tembawang hidup komunitas suku Dayak dengan sub suku Dayak Sungkung, hal ini dapat dilihat dengan masih kentalnya adat istiadat pada desa Suruh Tembawang diantaranya masih terpelihara dengan baik yaitu "Gawai" atau gawai panen. Adapun *gawai* ini merupakan upaya untuk mengikat hubungan kekeluargaan antar warga, baik dengan masyarakat satu desa maupun dengan desa lain di wilayah Malaysia. Kemudian, keunikan lain yaitu dalam penyelesaian suatu perkara yang terjadi di masyarakat seperti tindakan yang melanggar norma sosial masyarakat pada umumnya diselesaikan dengan cara hukum adat, yang sifatnya berjenjang mulai dari pengurus adat, dan temenggung adat. Dan apabila masih tidak dapat diselesaikan maka dapat diselesaikan dengan hukum positif. Hukum adat Dayak masih sangat kental pada kehidupan dan keseharian masyarakat setempat.

Keadaan ekonomi masyarakat desa Suruh Tembawang adalah ekonomi kelas menengah ke bawah, hal ini dikarenakan keadaan geografis desa Suruh Tembawang berada jauh dari kota kecamatan Entikong, dengan akses yang sulit serta kawasan perbukitan. Hal ini memicu sulitnya masyarakat menjangkau kota kecamatan Entikong untuk proses jual beli barang. Sehingga, masyarakat setempat memilih untuk menjual hasil tani di Malaysia, lalu mereka membeli produk pangan di Malaysia pula. Hingga saat ini, akses transportasi masyarakat menuju ibukota kecamatan masih sangat sulit yang ditempuh dengan dua jalur yaitu jalur darat yang melewati perbukitan, atau berlumpur saat hujan, sangat belum memadai serta melewati jalur sungai yang berhadapan dengan kondisi air dan riam berbahaya. Oleh karena itu, tidak heran apabila adanya proyek pembangunan Terminal Barang Internasional di Entikong, banyak warga di Suruh Tembawang yang tidak mengetahui hal tersebut.

Untuk mata pencarian masyarakat desa Suruh Tembawang sebagian besar adalah petani kebun dan ladang, masyarakat memanfaatkan kondisi wilayah perbukitan. Kawasan perbukitan sangat cocok ditanami lada, karet, sawi ladang, timun ladang, dan komoditi lainnya. Lada menjadi komoditi yang bisa diandalkan serta hasil perkebunan seperti terung asam, jahe, kacang tanah, jagung, pisang, durian, rambutan, langsung, cempedak, dan jenis lainnya. Komoditi ini sangat diminati oleh masyarakat Malaysia, khususnya di kampung Sapit.

Masyarakat di dusun Badat Lama pada saat belum terbukanya akses jalan menuju ibukota Kecamatan Entikong masih melakukan transaksi jual beli di Kampung Gun Sapit (District Pedawan) yang merupakan desa di wilayah Kuching, Sarawak, Malaysia yang berbatasan langsung dengan Badat Lama. Secara *history* masyarakat Badat merupakan sub suku Dayak Sungkung, yang mana sub Dayak ini masih memiliki keterkaitan dengan sub suku Dayak di Gun Sapit (Malaysia) sehingga persoalan interaksi bukanlah hal yang baru, dari berjualan hasil bumi, hingga pernikahan berbeda negara.

Latar belakang geografis di Badat Lama yang merupakan wilayah perbukitan membuat masyarakat setempat memanfaatkan lahan sebagai lahan pertanian, yang hasilnya kemudian banyak dijual ke Malaysia. Selain persoalan harga dan permintaan, akses menuju Entikong juga sangat sulit, karena di Malaysia memiliki permintaan dan harga yang lebih tinggi. Adapun hasil pertanian yang dijual ke kampung Gun Sapit berupa jahe, lemon, cabe, terung asam dan lada yang biasa dijual pada hari Rabu dan Kamis. Secara khusus tidak ada pasar tradisional di Gun Sapit (Malaysia) yang menampung hasil penjualan masyarakat Badat Lama, masyarakat Badat Lama menjual hasilnya ke warung-warung warga Gun Sapit saja, yang artinya bahwa warga di Gun Sapit wilayah Malaysia sebagai penampung hasil alam masyarakat di Badat Lama.

Akses jalan yang hanya mengandalkan transportasi sungai menuju Entikong saat itu dengan biaya yang besar serta resiko yang didapat dan jarak tempuh hampir satu hari. Masyarakat dusun Badat Lama lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat Gun Sapit (Malaysia) dibanding masyarakat Entikong (Indonesia). Interaksi yang sudah lama terjalin dengan Malaysia mengakibatkan adanya jaringan sosial ekonomi pada masyarakat setempat dengan negara Malaysia. Adanya jual beli hasil pertanian dan kebutuhan pokok bagi masyarakat setempat, interaksi sosial yang telah lama terjalin ini diakibatkan oleh akses jalan yang sulit. Di sisi lain, infrastruktur belum memadai hingga memaksa masyarakat lebih memilih negara tetangga.

Deskripsi waktu tempuh dari dusun Badat lama menuju kampung Gun Sapit (Malaysia) hanya memerlukan waktu lima jam untuk menuju negara tetangga yang melewati jalan setapak dan naik turun bukit. Meskipun, telah dibukanya akses jalan darat dari dusun Badat Lama menuju kecamatan Entikong, namun masyarakat masih ada yang menjual hasil pertanian dan berbelanja ke Malaysia.

### **5. Pembangunan Terminal Barang Internasional: Untuk Masyarakat Lokal?**

Beberapa hal yang penting dan menjadi fokus pembangunan di wilayah perbatasan adalah meningkatnya perhatian terhadap jaringan, mobilitas, arus globalisasi, dan kosmopolitanisasi yang berperan dalam mewarnai sifat-sifat kawasan perbatasan. Komponen-komponen ini merupakan kunci penting dalam memahami konteks wilayah perbatasan secara utuh (Rumford, 2006). Kemudian, berdasarkan hasil FGD antar sektor dan lembaga di Jakarta, dimana penulis berpartisipasi menjadi peserta, masih terdapat kegamangan beberapa stakeholder dalam memaknai Terminal Barang Internasional, apakah dengan tujuan ekspor-impor ke berbagai negara ataukah hanya ekspor-impor untuk dua negara saja, yaitu Indonesia dan Malaysia.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi memiliki peluang dalam pengembangan kawasan perbatasan karena kawasan ini memiliki modal dasar penting dalam pengembangan kawasan perbatasan, yaitu elemen budaya, kerangka kerja institusi, ketertarikan sektor swasta, pendekatan infrastruktur, kebijakan dan investasi (Kurniadi, 2009). Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang dihadiri oleh kementerian dan lembaga serta stakeholder, dapat disimpulkan bahwa pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) di Entikong sudah pada tahap finishing. Sementara itu, kesiapan dari kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pertanian yang masih pada tahap identifikasi produk unggulan lokal dalam rangka pemilihan produk ekspor.

Berdasarkan pada hasil perjanjian kedua negara, dapat dikatakan bahwa Indonesia dan Malaysia sudah sejak lama berhubungan baik dalam mengelola perbatasan antar-negara. Menurut penuturan Kasubdit Hubungan Bilateral Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa perjanjian kerjasama BTA sejak 1970-an masih berlaku sampai saat ini. Namun, dari Kementerian Perdagangan sudah menyurati Kementerian Perdagangan Malaysia untuk duduk bersama dalam perombakan ulang perjanjian BTA ini, dan kemungkinan dengan adanya Terminal Barang Internasional di Entikong bisa jadi perjanjian kerjasama ini akan dibuat baru. Terlebih lagi BTA ini hanya berlaku untuk perbatasan Entikong saja, sedangkan wilayah perbatasan lain tidak. Ini sebenarnya masih dilema bagi kedua negara, oleh karena itu pihak Kemendagri menyurati Kementerian Dagang Malaysia, namun hingga saat ini belum ada tanggapan karena di Malaysia ketika itu masih pada masa transisi pergantian pemerintahan.

Program pengelolaan batas wilayah negara yang ditetapkan sangat erat kaitannya dengan program pembangunan negara tetangga. Dari beberapa permasalahan yang ada di kawasan perbatasan, masalah penetapan batas (delimitasi) dan penegasan batas negara (demarkasi) merupakan salah satu permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan oleh pemerintah Indonesia (Lembaga Administrasi Negara, 2004). Kemudian, pada kenyataannya masyarakat lokal belum secara signifikan memanfaatkan akses ekonomi ini. Permasalahan utamanya adalah infrastruktur dari desa terpencil ke kecamatan cukup sulit. Seperti sulitnya aksesibilitas membuat masyarakat dusun Badat Lama memilih Gun Sapit di Sarawak sebagai tempat untuk menampung dan menjual hasil tani masyarakat Badat Lama, yang mana jalan yang dilewati melintasi pegunungan melewati sungai yang sulit saat terjadi banjir namun masyarakat tetap rela menunggu untuk bisa menyeberangi sungai yang banjir dan melewatinya untuk sampai ke Gun Sapit. Artinya bahwa masyarakat lokal masih berorientasi pada ekonomi dari negara tetangga, hal ini dikarenakan akses infrastruktur ke wilayah Malaysia lebih mudah.

*Border Development Centre* (BDC) adalah kawasan strategis yang memiliki potensi untuk pemusatan kegiatan ekonomi baru yang mengarah pada dua kegiatan utama yaitu kawasan industri dan perdagangan bebas yang dibagi dalam satuan guna lahan utama sehingga membentuk struktur ruang yang terdiri dari blok-blok lingkungan dan menjadi satu kesatuan ruang yang sinergis sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan dan sekitarnya (Simbolon, 2009).

Lebih lanjut, menurut Fauzi (2011) prasarana dan sarana yang direncanakan dibangun di BDC meliputi:

1. Sarana perekonomian: *Duty free shop, marketing point*, pasar tradisional, perkantoran.
2. Sarana olahraga dan rekreasi; lapangan golf dan Villa, lapangan olahraga, sarana rekreasi, hotel.
3. Sarana industri; kawasan industri besar, menengah, dan kecil.
4. Prasarana transportasi; terminal penumpang dan barang.
5. Sarana permukiman dan penunjangnya; perumahan RSh dan Rusunawa, sekolah SD, SMP, SMU, rumah sakit tipe C.
6. Sarana penunjang keimigrasian: pintu gerbang PPLB, kantor imigrasi, karantina hewan dan tumbuhan serta pos polisi.
7. Ruang Terbuka Hijau.

Berdasarkan rencana tersebut yang sudah sejak lama menjadi prioritas pembangunan perbatasan Entikong, pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) menjadi kegiatan berikutnya yang saat ini juga sudah hampir rampung. Berdasarkan keterangan BNPP Terminal Barang Internasional di Entikong sudah siap diresmikan pada tahun 2019 ini. Namun demikian, kelemahan dasar pembangunan Terminal Barang Internasional di Entikong adalah belum tersedianya alur komunikasi antar lembaga dan institusi lokal dalam ambil bagian dalam pembangunan. Sehingga, masyarakat lokal di Kecamatan Entikong, khususnya yang berasal dari kampung terpencil, masih ada yang tidak mengetahui tentang pembangunan Terminal Barang Internasional di wilayah mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Subdit Hubungan Bilateral Kemendagri menyebutkan bahwa sarana ekspor dan impor di wilayah perbatasan diakui belum memadai. Pembangunan Terminal Barang Internasional perbatasan Entikong ini yang pertama dibangun di wilayah batas Indonesia. Semua akan dimaksimalkan, karena TBI entikong ini akan menjadi role model bagi pembangunan TBI di wilayah batas lainnya ke depan.

## **6. Kebermanfaatan Pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) Entikong**

Tata kelola wilayah batas sudah semestinya tidak hanya tersentral pada pusat di wilayah sentral Entikong saja, melainkan juga di wilayah-wilayah sulit dijangkau sekalipun. Masyarakat di sekitar wilayah batas seperti masyarakat adat, perlu diikutsertakan secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan karena mereka merasa memiliki hak-hak ulayat yang telah ada sejak sebelum Republik ini berdiri. Artinya bahwa pelibatan masyarakat lokal dalam pengambilan kebijakan serta implementasinya perlu menjadi format baku dalam pengelolaan wilayah perbatasan. Selama ini yang terjadi hanyalah pelibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi saja. Sedangkan keputusan dan implementasi kebijakan sepenuhnya diambil oleh pemangku kepentingan.

Pengelolaan perbatasan sepenuhnya dari pusat, yaitu dengan membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Pembentukan BNPP dimaksudkan agar pengelolaan perbatasan lebih fokus, sinkron, terkoordinasi, dan berada pada satu pintu pengelolaan. BNPP sendiri melalui Deputy Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, mempunyai sejumlah tugas strategis antara lain melakukan inventarisasi potensi sumberdaya dan membuat rekomendasi penetapan zona pengembangan ekonomi, pertahanan, sosial budaya, lingkungan hidup dan zona lainnya di Kawasan Perbatasan (Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2011).

Khusus pada perbatasan Entikong, pemerintah telah membentuk suatu badan yang khusus untuk mengidentifikasi pembangunan perbatasan secara khusus yaitu *Border Development Centre* (BDC). Fauzi (2011) menyebutkan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah dalam pengembangan pemberlakuan BDC di Entikong meliputi:

1. Membangun pola pendanaan bersama untuk pembentukan dan operasionalisasi Badan Pengelola BDC Entikong. Badan Pengelola ini memiliki tugas menyusun kebijakan pengembangan dan mengkoordinasikannya di tingkat pusat.
2. Sinkronisasi kegiatan-kegiatan pemerintah pusat dan daerah melalui penetapan anggaran pembangunan sektoral dan daerah yang diarahkan bagi pengembangan BDC Entikong.
3. Memacu pendekatan kerjasama dan perhatian yang lebih besar/khusus dengan instansi-instansi sektoral di pusat guna memacu pengembangan infrastruktur BDC Entikong.
4. Memperbesar kontribusi sumber pendanaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), disamping dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan swasta/investor.
5. Menggalang dukungan dan fasilitasi dari instansi pusat dan pihak investor baik dalam maupun luar negeri untuk pengembangan BDC Entikong

Pada sisi lain, agenda BNPP dalam percepatan pembangunan daerah perbatasan antara lain: Percepatan dan peningkatan jangkauan dan mutu pelayanan sosial dasar perbatasan, Pengembangan sistem pelayanan khusus kawasan perbatasan, dan Percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan sosial dasar (BNPP, 2011). Proses identifikasi dan proses pembangunan terpadu perbatasan Entikong ini diharapkan menjadi percontohan pengelolaan perbatasan darat di wilayah batas negara Indonesia. Termasuk dalam pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) yang merupakan pertama kali dan satu-satunya terminal ekspor impor di wilayah perbatasan di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah lama bekerjasama dengan pemerintah Malaysia dalam rangka menciptakan hubungan baik antar negara. Kerjasama yang sudah dan sedang digalakkan oleh kedua negara ini yaitu kerjasama di bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial, serta pemberantasan terorisme, termasuk di dalamnya adalah kerjasama trans-border Indonesia dan Malaysia. Kerjasama yang terkait dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dua negara (Indonesia-Malaysia) bersepakat dalam hubungan diplomatik diantaranya Sosek-Malindo, Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia, forum kerjasama kawasan (Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pada beberapa kajian tentang hubungan kerjasama Indonesia dengan Malaysia menyebutkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki keterbuhungan sejarah masa lalu yang hampir sama (serumpun), sehingga masyarakat perbatasan di Malaysia dengan masyarakat perbatasan di Indonesia memiliki budaya yang hampir sama sehingga memiliki prospek yang baik dalam membangun kerjasama antar budaya dan ekonomi (Asmarani, Suni, Nugrahaningsih, 2014; Yovinus, 2016; Utomo, 2017).

Penyelesaian penetapan (delimitasi) dan penegasan (demarkasi) batas darat dengan negara-negara tetangga masih pada tahap pro dan kontra. Hal ini karena masih adanya ketidakjelasan penetapan patok batas yang belum disepakati kedua belah pihak. Persoalan sengketa wilayah (*territorial dispute*) dengan negara tetangga diharapkan akan semakin berkurang dan kedaulatan negara yang terkait dengan batas wilayah tidak akan terganggu, dengan adanya Terminal Barang Internasional sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan.

## **7. Kesimpulan**

Pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI) menjadi ujung tombak perubahan wajah beranda negara di Entikong. Jalur ini menjadi satu-satunya aktivitas ekspor-impor antar negara dengan jalur darat. Namun kemudian, muncul ketidakjelasan apakah aktivitas ekspor-impor diperuntukkan bagi beberapa negara di dunia, atau hanya antar dua negara Indonesia dan Malaysia saja. Pembahasan ini masih dilakukan di level kementerian yang menjadi leading sektor, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri dan BNPP.

Perlunya pembenahan dari sisi penyediaan terhadap infrastruktur dan regulasi efektif terkait dengan pembangunan Terminal Barang Internasional (TBI), sehingga kondisi disparitas yang ada dapat diminimalisir. Aspek kebermanfaatannya Terminal Barang Internasional (TBI) masih belum terlihat menjangkau masyarakat lokal, hal ini terlihat masih adanya penyeleksian pada produk-produk lokal yang layak menjadi produk ekspor. Regulasi mengenai keharusan masyarakat lokal menerima manfaat, seperti peningkatan

ekonomi lokal dan penyelenggaraan akses dalam berbagai hal, belum terlihat menjadi bahasan prioritas.

#### Daftar Pustaka

- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Asmarani, M., Suni, B., Nugrahaningsih, N. (2014). Kerjasama Sosial dan Ekonomi Malaysia-Indonesia. *Jurnal Tesis PMIS-Untan-PSIP*, 1-16
- Astuti, T. M. P. (2018). Trafficking di Pos Lintas Batas Entikong-Tebedu: Kasus di Perbatasan Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Forum Ilmu Sosial*. 45(1), 34-50
- Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. (2011). *Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan perbatasan Tahun 2011-2025*. Jakarta: BNPP
- Chandler, D. (2009). Unravelling The Paradox of the “Responsibility of Protect”. *Irish Studies in International Affairs*, 20, 27-39
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Elfitriani, Y., Legionosuko, T., Waluyo, S. D. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*. 4(3), 120-136
- Elyta. (2012). Penanggulangan Perdagangan Perempuan di Perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat: Perspektif Keamanan Manusia. *Indonesian Journal of Dialectics*. 2(2), 1-16
- Fauzi, G. (2011) *Profil Potensi Kawasan Perbatasan provinsi Kalimantan Barat*. Jakarta: Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia
- Iva, R., dan Fauzan. (2012). Problem Diplomasi Perbatasan dalam Tata Kelola Perbatasan Indonesia-Malaysia. *JSP*, 16(2), 56-63
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku putih pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kemenhan RI
- Koentjaraningrat. (1974). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia
- Koentjaraningrat. (1981). *Sejarah Antropologi*. Jakarta: UI Press
- Kristi, P., Damayanti, C., Haqqi, H. (2018). Border Diplomacy Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menangani Penyelundupan Gula Di Entikong. *Jurnal Transformasi*, 1(34), 1-12
- Kurniadi, D. (2009). *Strategi Pengembangan Wilayah Perbatasan Antarnegara: Memacu Pertumbuhan Ekonomi Entikong Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat*. Tesis: Universitas Diponegoro Semarang.
- Laki, J. (2006). Non Traditional Security Issues: Securitisation of Transnational Crime in Asia. *Institute of Defence and Strategic Studies Workpaper*. No. 98.
- Laporan Pemerintahan Kecamatan Entikong (2010). Sanggau: Pemerintah Kecamatan Entikong
- Lembaga Administrasi Negara. (2004). *Kajian Manajemen Kawasan Perbatasan Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lipsey, R. G., & Steiner, P. O. (1991). *Pengantar Ilmu Ekonomi I Edisi Ke-enam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2004). *Sosiologi Teks: Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Group
- Niko, N. (2016). Kemiskinan Sebagai Penyebab Strategis Praktik *Human Trafficking* di Kawasan Perbatasan Jagoi Babang (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC*. Universitas Bakrie, Jakarta. 2-3 Mei 2016.
- Niko, N. (2017). Fenomena Trafficking in Person di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat. *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*. 4(1), 32-37.
- Niko, N. (2019). 2019. Kemiskinan Perempuan Dayak Benawan sebagai Bentuk Kolonialisme Baru. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. 6(1), 58-76. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47467>
- Ohmae, K. (1995). *The end of Nations state: the rise of regional economics*. New York: Free Press.
- Rumford, C. (2006). ‘Borders and bordering’ (in G. Delanty (ed.) *Europe and Asia Beyond East and West: Towards a New Cosmopolitanism*). London: Routledge.
- Santrock, J. W. (2007). *Perkembangan Anak. Jilid 1 Edisi ke-sebelas*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Simbolon, C. (2009). *Pemberdayaan masyarakat Dalam rangka keamanan: Studi kasus propinsi Kalimantan Barat*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

- Soekanto, S. (2014). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sumarsono. (2012). *Pembangunan Kawasan Manajemen Tasbara*. Jakarta: Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kedeputan Batas Wilayah Negara.
- Utomo, A. P. (2016). Strategi Pengembangan Industri Kreatif Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol. 5, No. 4, 1.365-1.380.
- Wangke, H. (2017). *Kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Pengelolaan Perbatasan di Kalimantan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Yovinus. (2016). Prospek Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan. *Jurnal Dinamika Global*. Vol 1, No. 2, 24-43.